

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dengan mengukur efisiensi kinerja BPRS di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Yang mana bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan, sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mampu bertahan dalam menghadapi persaingan industri keuangan di Indonesia.

Pada pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) menghasilkan BPRS dengan nilai efisiensi 1 atau 100% selama periode 2011 hingga 2015 adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan di Provinsi Jawa Barat, Harta Insan Karimah di Provinsi Banten, BPRS Oloan Ummah Sidempuan di Provinsi Sumatra Utara, BPRS Rajasa di Provinsi Lampung dan BPRS Dinar Ashri di Provinsi NTB. Selain untuk mengukur nilai efisiensi dari masing-masing BPRS yang ada dalam sampel, metode DEA juga dapat digunakan untuk memberikan referensi atau acuan BPRS bagi BPRS yang berada dalam kondisi inefisien agar mampu mencapai kondisi efisien. Maka BPRS yang inefisien akan menjadi efisien 100 persen dengan mencapai target *output* yang maksimal seperti pada BPRS yang menjadi acuan perbaikannya.

Sedangkan penilaian kinerja dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) menghasilkan BPRS Bumi Artha Sampang di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai SMI sebesar 41,57%.

Sedangkan pendekatan yang baik untuk dapat digunakan sebagai pengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia adalah dengan kedua pendekatan yaitu pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Sharia Maqasid Index* (SMI) karena dua pendekatan ini dapat mengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara lengkap atau saling melengkapi. Hal ini karena dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) dapat mengukur kinerja BPRS yang sesuai dengan tujuannya yang tidak berorientasi pada keuntungan belaka akan tetapi dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan serta dilengkapi oleh pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang dapat memberikan gambaran target perbaikan pada rasio yang perlu ditingkatkan agar BPRS dapat mencapai nilai efisiensi optimum pada periode berikutnya.

B. Saran

1. Saran Bagi Regulator
 - a. Bagi regulator dan pihak terkait perlu untuk membuat kebijakan tentang laporan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bahwa BPRS telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktivitas perbankannya.

- b. Bagi BPRS yang belum memiliki efisiensi optimumnya, maka diperlukan target perbaikan yang diberikan pada pengukuran efisiensi dengan pendekatan DEA.
- c. Bagi regulator dan pihak terkait, dalam melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja atau keberhasilan organisasi. Maka diperlukan kedua pengukuran kinerja agar dapat menjalankan kedua fungsi utamanya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pemilik dana dan memberikannya kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya serta berdampak pada pembangunan nasional.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Peneliti mengalami kendala dalam pengambilan data dalam laporan keuangan karena laporan keuangan BPRS tidak selengkap laporan keuangan Bank Umum Syariah.
- b. Peneliti mengalami kendala dalam pengambilan data dalam laporan keuangan karena laporan keuangan BPRS tidak memiliki annual report yang dapat dibutuhkan untuk menganalisis secara lebih spesifik guna pengukur kinerja dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI).

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang lebih lengkap untuk setiap periode kuartal.

- b. Dalam pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) sebaiknya menambahkan variabel yang menunjukkan indikator atau tolak ukur yang sesuai dengan tujuan syariah atau terdapat unsur *Islamic Wordview* dalam variabel *input* dan *outputnya*.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS) dan membandingkannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jordania, Arab Saudi dan lainnya.

